

ABSTRAK

CHARLY OCTOENAS HUTAGALUNG

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan menjadi semakin marak.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier", dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Pengaturan hukum pengangkutan kayu hasil hutan dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan hukum pengangkutan kayu hasil hutan di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK), dan Peraturan Daerah (Perda). Pertanggungjawaban pidana atas orang yang mengangkut kayu hasil hutan tanpa disertai dokumen yang lengkap. Pertanggungjawaban pidana bisa terjadi apabila terjadi kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku yang melakukan tindak pidana secara sadar ataupun kealpaannya. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3988 K/Pid.Sus-LH/2023. Alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi

Disimpulkan bahwa Pengangkutan kayu harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) atau Nota Angkutan, serta dokumen-dokumen lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. kegiatan pengangkutan hasil hutan tanpa SKSHHK termasuk dalam delik illegal logging yang didakwakan dengan Pasal 83 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dengan sanksi pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp. 500.000.000,00 subsider 1 bulan kurungan, pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, mengangkut, kayu, hutan

ABSTRACT

CHARLY OCTOENAS HUTAGALUNG

Forest areas are open natural resources, so that public access to enter and utilize them is very large. This condition has spurred problems in forest management. Along with the spirit of reform, logging and wood theft activities in the forest have become increasingly rampant.

This research is descriptive with a normative legal approach. "The normative legal approach emphasizes legal science by emphasizing secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials", and to complete the data, relevant materials are collected and literature studies are conducted, which will then be analyzed legally.

Legal regulations for the transportation of forest wood in laws and regulations. Legal regulations for the transportation of forest wood in Indonesia are regulated by various laws and regulations, such as the Forestry Law, the Regulation of the Minister of Environment and Forestry, and Regional Regulations. Criminal liability for people who transport forest wood without complete documents. Criminal liability can occur if an error occurs that can be accounted for by the perpetrator who commits a crime consciously or through negligence. Legal considerations of the judge in the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 3988 K/Pid.Sus-LH/2023. The Public Prosecutor's cassation reasons relate to the assessment of the results of the evidence which is of an appreciative nature regarding a fact. This cannot be considered in the examination at the cassation level

It is concluded that the transportation of wood must be equipped with a Certificate of Legality of Timber Forest Products or Transportation Note, as well as other documents in accordance with applicable laws and regulations. The activity of transporting forest products without SKSHHK is included in the crime of illegal logging which is charged with Article 83 paragraph (1) letters (a) and (b) of the Law on the Prevention and Eradication of Forest Destruction. With a criminal penalty of 1 year imprisonment and a fine of Rp. 500,000,000.00 subsidiary 1 month imprisonment, examination at the cassation level only concerns the non-application of a legal regulation or the legal regulation not being applied properly, or whether the trial method was not carried out according to the law, and whether the Court has exceeded its authority, as referred to in Article 253 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law

Keywords: Accountability, transport, wood, forest